



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA LAPANGAN
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DALAM RANGKA MELAKUKAN PENELAAHAN ATAS
PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN)
KE JALAN TOL TRANS SUMATERA
RUAS PALEMBANG – INDRALAYA - PRABUMULIH
DI SUMATERA SELATAN
TANGGAL 14—17 NOVEMBER 2023**

I. PENDAHULUAN

Definisi secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/ atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/Badan Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan modal negara pada perusahaan negara. Lebih lanjut, Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Adapun bentuk-bentuk PMN adalah Tunai, yakni Pemerintah memberikan sejumlah uang kepada BUMN; Konversi piutang Pemerintah yaitu Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN; dan Hibah saham/aset dari pihak lain. Lebih lanjut, maksud dan tujuan penambahan PMN kepada BUMN tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-1/MBU/03/201 tentang

Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Dari sisi anggaran, pada tahun 2022 Kementerian BUMN mengusulkan PMN kepada 12 BUMN dengan total Rp 72,4 triliun. Secara umum total investasi pemerintah dalam bentuk PMN pada periode 2005-2021 kepada BUMN sebesar Rp 361,3 triliun dan kepada BLU sebesar Rp334,3 triliun atau total keseluruhan sebesar Rp 695,6 triliun. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 disebutkan realisasi pembiayaan PMN/Investasi pemerintah sebesar Rp 113,46 triliun atau 72,99% dari anggaran Rp 155,46 triliun. PMN ini antara lain terdiri atas PMN untuk BUMN, PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional, PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan PMN/Investasi lainnya.

Berdasarkan Undang-undang APBN/APBN-P selama periode Tahun 2015-2018 diketahui terdapat 71 transaksi penyaluran PMN kepada 50 BUMN (4 berada di lingkungan Kementerian Keuangan dan 46 berada di lingkungan Kementerian BUMN). PMN diberikan dalam bentuk tunai maupun non tunai dengan total anggaran sebesar Rp125,40 triliun, yaitu tahun 2015 sebesar Rp64,88 triliun, tahun 2016 sebesar Rp50,53 triliun, tahun 2017 sebesar Rp6,37 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp3,60 triliun.

Lebih lanjut secara detail, Alokasi APBN pada lima program prioritas nasional yang dibiayai dana penyertaan modal negara (PMN) tunai tahun 2015-2018 senilai Rp88,58 triliun sebanyak 41 BUMN (termasuk 5 anak perusahaan) dan realisasi penyaluran dana sebesar Rp88,57 triliun dan telah digunakan sebesar Rp79,4 triliun, terdapat sisa dana sebesar Rp8,93 triliun per 30 September 2019. Adapun lima program prioritas nasional tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp62,41 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan bandara, penyelesaian jalan tol strategis dan pembangunan jalan tol trans Sumatera, kawasan ekonomi khusus, proyek pembangkit listrik 35 GW, Infrastruktur LRT Jabodetabek.
2. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kedaulatan Pangan sebesar Rp10,67 triliun ditujukan antara lain untuk mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih, peningkatan produksi gula dan garam, serta peningkatan produksi ikan nasional.
3. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Maritim sebesar Rp 5,15 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan kepelabuhan di Indonesia timur, penyediaan kapal penumpang dan kapal barang, perbaikan dan pengembangan terminal ferry, serta pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal.

4. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Industri Pertahanan dan Keamanan, sebesar Rp 2,60 triliun antara lain ditujukan untuk peningkatan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, mengantisipasi berkembangnya pasar, dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.
5. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kemandirian Ekonomi Nasional sebesar Rp 4,25 triliun, antara lain ditujukan untuk pembiayaan, penjaminan kredit usaha rakyat dan pendampingan UMKM.

Dalam rangka mendorong pengembangan kawasan di Pulau Sumatera dan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional, Pemerintah melakukan percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera melalui penugasan kepada BUMN. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 dan telah dirubah melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2022 menugaskan PT Utama Karya (Persero) untuk melaksanakan pengusahaan 24 ruas Jalan Tol di Sumatera.

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.813 km dibagi menjadi 4 tahap. Tahap I, 6 ruas telah beroperasi, 4 ruas beroperasi sebagian, dan 7 ruas sisanya dalam tahap konstruksi. Tahap II, ruas *backbone* yang akan menghubungkan Palembang-Pekanbaru. Tahap III, ruas *backbone* lanjutan yang akan menghubungkan Pekanbaru-Aceh. Tahap IV, Ruas *feeder*.

Pada periode 2017-2021, PT Utama Karya (Persero) mendapatkan total PMN sebesar Rp46,7 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan penugasan pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera. Untuk tahun 2023 dan 2024, PT HK kembali akan mendapatkan PMN masing-masing sebesar Rp28,8 triliun dan Rp18,6 triliun untuk penyelesaian proyek infrastruktur JTTS, Tol Kayu Agung-Palembang-Betung, dan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi.

Dari sisi audit/pemeriksaan, berdasarkan IHPS I Tahun 2022, BPK RI melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Program yang Dibiayai Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun 2015 s.d. 2018 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN Penerima PMN di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara (LHP: 22 April 2021). Dari LHP tersebut terdapat 70 temuan senilai Rp383,97 miliar dan USD 11.88 juta dengan 107 permasalahan dan 113 rekomendasi. Lebih detail lagi, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp166,48 miliar, potensi kerugian sebesar Rp30,18 miliar serta kekurangan penerimaan sebesar Rp86,49 miliar dan USD 11.88 juta.

Pemeriksaan BPK RI atas proyek JTTS mengungkapkan beberapa temuan dan permasalahan seperti proses pembebasan lahan yang terhambat, kenaikan biaya investasi, tambahan biaya bunga, dan hilangnya potensi pendapatan.

Berdasarkan uraian pada bagian ini, BAKN DPR RI perlu melakukan kunjungan kerja lapangan dengan PT Utama Karya (Persero) terkait dengan pembangunan dan pengelolaan JTTS yang dibiayai oleh Penyertaan Modal Negara (PMN). Dengan kunjungan kerja lapangan tersebut diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA LAPANGAN

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja lapangan dengan PT Utama Karya (Persero) dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang pembangunan dan pengelolaan JTTS yang dibiayai oleh Penyertaan Modal Negara (PMN) serta jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dilaksanakan pada tanggal 14-17 November 2023.

B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-533	H. WAHYU SANJAYA, S.E, M.M	KETUA BAKN DPR RI/F. PD
2.	A-201	Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI/ F. PDIP
3.	A-423	Dr. Hj. ANIS BYARWATI	WAKIL KETUA BAKN DPR RI /F. PKS
4.	A-314	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.,M.H.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-GOLKAR
5.	A-83	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.GERINDRA
6.	A-367	SAAN MUSTOPA, M.Si.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.NASDEM
7.	A-18	Drs. H. FATHAN, M.A.P.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.PKB
8.	A-495	AHMAD NAJIB QODRATULLAH, S.E.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PAN
9.	A-476	Dr. H.M. AMIR USKARA, M.KES	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PPP
10.	--	MARDIHARDJO, S.E.,M.Si	KABAG

11.	--	PARID, S.E	KASUBBAG RAPAT
12.	--	MUSBIYATUN	STAF SET. BAKN
13.	--	ARMAY ADELIA MAHARANI BASUKI, A.Md	STAF SET. BAKN
14.	--	FEBRI KUNTARTO, MBA	TENAGA AHLI BAKN
15.	--	WARIJAN, SE., ME	TENAGA AHLI BAKN
16.	--	RANGGA WIJAYA	TV PARLEMEN
17.	--	M. RIZKY RAMADHAN	MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL

C. Kegiatan Yang Dilakukan

Kunjungan kerja lapangan JTTS dengan PT Utama Karya (Persero) ke Ruas Palembang-Indralaya-Prabumulih dihadiri oleh Aloysius Kik Ro, Wakil Direktur Utama PT. Utama Karya. BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan terkait dengan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sebagai berikut.

1. Data Panjang tol yang telah terbangun sampai dengan Oktober 2023 sepanjang 933 km, menyisakan 34 km dari Pembangunan JTTS Tahap I sepanjang 967 km.



KM Terbangun sd Oktober 2023 dan Proyeksi sd 2023 & 2024

No	Ruas	Panjang Tol	Konstruksi sd Okt 23	Target sd Des 23	Konstruksi di Tahun 2024
		km	km	km	km
1	Medan Binjai	17	17	17	-
2	Palembang - Indralaya	22	22	22	-
3	Bakauheni - Terbanggi Besar	140	140	140	-
4	Pekanbaru - Dumai	132	132	132	-
5	Terbanggi Besar - Kayu Agung	189	189	189	-
6	Sigli - Banda Aceh	74	73	74	0,6
7	Indrapura - Kisaran	48	45	48	-
8	Padang - Sicincin	37	23	25	11,6
9	Bangkinang - Pangkalan	25	23	25	-
10	Pekanbaru - Bangkinang	40	40	40	-
11	Binjai - Pangkalan Brandan	58	55	57	1,4
12	Indralaya - Prabumulih	65	64	64	-
13	Bengkulu - Taba Penanjung	17	17	17	-
14	Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat	103	92	98	5,5
Total		967	933	947	19

Note : Panjang tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi Parapat diluar Dukungan Konstruksi sepanjang 40 km.

Adapun penyelesaian JTTS Tahap I yang semula ditargetkan selesai pada tahun 2023 namun tidak dapat tercapai, terdapat tiga ruas yaitu Sigli–Banda Aceh, Binjai–Pangkalan Brandan dan Sicincin–Padang yang baru dapat diselesaikan pada tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan adanya kendala pembebasan lahan yang hingga saat ini belum dapat terselesaikan. Kendala pembebasan lahan yang terjadi antara lain sebagai berikut:

- a. Sigli–Banda Aceh: Adanya Penlok Tambahan untuk memenuhi kebutuhan lahan ROW dan adanya trase tol yang melewati Kawasan Hutan sehingga memerlukan proses khusus dalam penerbitan SK Pelepasannya.
 - b. Binjai–Pangkalan Brandan: Pembebasan lahan pada Seksi 3 pada STA 44 sd STA 46 sepanjang 1,8 km dan Akses Pangkalan Brandan sepanjang 1,6 km.
 - c. Sicincin–Padang: Saat ini masih menyisahkan lahan yang belum bisa konstruksi sepanjang 2,57 km yang terus diupayakan untuk pembebasannya.
2. Berdasarkan perhitungan internal PT Hutama Karya, dengan memperhatikan realisasi Lalu Lintas JTTS sebagai asumsi proyeksi lalu lintas kedepannya, diperoleh BEP atas investasi JTTS dikisaran 20-30 tahun.



Realisasi Lalu Lintas Harian Rata-rata s.d September 2023

Ruas	Kendaraan
TBPPKA	8.942
Palembang-Indralaya	7.877
Pekanbaru-Dumai	8.932
Aceh-Sigli	1.841
Binjai-Brandan	8.232
Pekanbaru-Bangkinang	4.780
Bengkulu-Taba Penanjung	1.527

3. Berikut merupakan alokasi penggunaan PMN Tahun Anggaran 2023 dan 2024 yang utamanya digunakan untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

No	Ruas	Alokasi PMN TA 2023 (Rp M)	Alokasi PMN TA 2024 (Rp M)
Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I			
1	Medan - Binjai	-	-
2	Bakauheni - Terbanggi Besar	-	-
3	Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung	-	-
4	Palembang - Simpang Indralaya	-	-
5	Pekanbaru - Dumai	-	-
6	Binjai - Langsa (Seksi Binjai - Pangkalan Brandan)	1.096	1.294
7	Sp Indralaya - Muara Enim (Seksi Simpang Indralaya - Prabumulih)	-	-
8	Kisaran - Indrapura	1.176	638
9	Kuala Tanjung - Parapat (Seksi Kuala Tanjung - Pematang Siantar)	3.036	194
10	Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu (Seksi Taba Penanjung - Bengkulu)	266	478
11	Sigli - Banda Aceh	1.980	1.008
12	Pekanbaru - Padang (Seksi Sicincin - Padang)	5.339	2.012
13	Pekanbaru - Padang (Seksi Pekanbaru - Koto Kampar)	797	480
Subtotal Tahap I		13.690	6.104
Jalan Tol Trans Sumatera Tahap II			
1	Betung-Tempino-Jambi	7.285	-
2	Junction Pekanbaru-Bypass Pekanbaru	7.909	-
Subtotal Tahap II		15.194	-
Non Penugasan Jalan Tol Trans Sumatera			
1	Kayu Agung - Palembang - Betung	-	10.000
2	Bogor - Ciawi	-	2.500
Subtotal Non Penugasan JTTS		-	12.500
Total		28.884	18.604

4. Untuk ruas-ruas JTTS Tahap I, anggaran PMN ini nantinya akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan.
5. Untuk JTTS Tahap II status terkini dalam proses pembahasan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dengan Kementerian PUPR, namun untuk *Detail Engineering Design* telah dilakukan sebelumnya. Sehingga rencananya pada akhir tahun ini Ruas Junction-Bypass Pekanbaru akan mulai pembangunan, sementara untuk Ruas Betung-Jambi seksi yang dibangun melalui dukungan konstruksi saat ini sudah dalam proses Pembangunan.
6. Untuk ruas Tol Non Penugasaan, pembahasan terkini untuk Ruas Bogor-Ciawi tidak jadi ditugaskan kepada PT HK, sementara untuk Tol Kayu Agung-Palembang-Betung saat ini masih dalam proses pembahasan skema terbaik untuk melanjutkan Pembangunan ruas tersebut, yang sebelumnya dibangun oleh PT Waskita Karya.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

Kesimpulan kunjungan kerja lapangan JTTS dengan PT Utama Karya (Persero) ke Ruas Palembang-Indralaya-Prabumulih, proyek JTTS yang dibiayai oleh PMN memberikan dampak:

1. Bagi Pemerintah:
 - a. Meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera.
 - b. Peningkatan *Economic IRR* dan fiskal selama masa konsesi.
2. Bagi Masyarakat:
 - a. Waktu tempuh perjalanan di Sumatera menjadi lebih efisien.
 - b. Penurunan biaya transportasi barang dan/atau manusia rata-rata sebesar 24,22%.
 - c. Penyerapan tenaga kerja selama masa konsesi di sepanjang koridor JTTS.
3. Bagi PT Utama Karya:
 - a. Struktur permodalan Perusahaan menjadi lebih kuat dalam melakukan pengusahaan jalan tol.
 - b. *Financial IRR* perusahaan menjadi lebih tinggi.

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja lapangan ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari Aloysius Kiik Ro, Wakil Direktur Utama PT. Utama Karya. Pertemuan itu juga menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan PT. Utama Karya atas kebijakan dan ketentuan terkait dengan PMN.
